

KORELASI PENDAPATAN PERKAPITA, KULTUR DEMOGRAFI DAN PENCAPAIAN SDGs-2: COMPARASIDESKRIPSTIF WILAYAH BARAT DAN TIMUR INDONESIA

Ery Jayanti¹, Hismendi², Arjuniadi³

^{1, 3)} Universitas Jabal Ghafur Sigli

²⁾ Politeknik Negeri Lhokseumawe

Korespondensi penulis:

hismendi76@gmail.com

Abstract

This research is to find out the comparison and test the correlation between per capita income, demographic culture and achievement of SDGs-2 (Poverty and Hunger Index) which is analyzed descriptively between the western and eastern regions of Indonesia. The research was conducted by looking at two years of data, namely data for 2016 and 2020, as implicit from the initial transition from the MDGs to SDGs and as an evaluation of the six-year journey of the SDGs program. The research was conducted in two regions in Indonesia, namely the eastern region and the western region of Indonesia, each consisting of 14 provinces through panel data. The methodology for compiling the PHI (Poverty and Hunger Index) index is based on the methodology for compiling the Human Development Index (HDI) conducted by UNDP. The results of the study show that the value of the poverty and hunger index (PHI) in the eastern and western regions of Indonesia is still high, reflecting that the poverty and hunger index in these regions still needs to be corrected. Based on the data, it is described that in 2020 all regions of the Western region will experience an improvement in the trend of the poverty and hunger index compared to 2016. There is a very close correlation between the variables of the poverty and hunger index and the Demographic Culture in the West and Eastern regions of Indonesia, which includes population density, fertility rate, and incomepercapita

Keywords: *SDG2, Poverty Hunger Index (PHI), Demographic Culture, Income Percapita*

ABSTRAK

Penelitian ini untuk menguji korelasi antara variabel pendapatan perkapita, budaya demografi dan pencapaian SDGs-2 yaitu Indeks Kemiskinan dan Kelaparan (IKK) yang dianalisis secara deskriptif antara wilayah barat dan timur Indonesia. Penelitian tersebut dilakukan dengan melihat data dua tahun yaitu data tahun 2016 dan 2020, yang tersirat dari awal transisi MDGs ke SDGs dan sebagai evaluasi perjalanan enam tahun program SDGs. Penelitian dilakukan di dua wilayah di Indonesia yaitu wilayah timur dan wilayah barat Indonesia yang masing-masing terdiri dari 14 provinsi melalui data panel. Metodologi penyusunan indeks PHI (Indeks Kemiskinan dan Kelaparan) didasarkan pada metodologi penyusunan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dilakukan oleh UNDP. Hasil kajian menunjukkan bahwa nilai indeks kemiskinan dan kelaparan (PHI) di wilayah timur dan barat Indonesia masih tinggi, mencerminkan indeks kemiskinan dan kelaparan di wilayah tersebut masih perlu dikoreksi. Berdasarkan data tersebut,

digambarkan bahwa pada tahun 2020 seluruh wilayah wilayah Barat akan mengalami perbaikan tren indeks kemiskinan dan kelaparan dibandingkan tahun 2016. Terdapat korelasi yang sangat erat antara variabel indeks kemiskinan dan kelaparan dengan Budaya Demografi wilayah Barat dan Timur Indonesia yang meliputi kepadatan penduduk, tingkat kesuburan, dan pendapatan perkapita

Kata kunci: SDGs2, Indeks Kemiskinan dan Kelaparan (IKK), Budaya Demografi, Pendapatan Perkapita

PENDAHULUAN

Pada tahun 2000 semua negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) berjanji untuk mendukung inisiatif global baru untuk memberantas kemiskinan dan kelaparan. Inisiatif ini dilakukan dengan membina dan memajukan pembangunan dengan tetap menekankan tanggung jawab bersama untuk menjunjung tinggi prinsip harkat, martabat, dan kesetaraan manusia (UNITED Nation, 2000). Tahun 2015 MDGs sudah berakhir, digantikan oleh SDGs sebagai kelanjutan program pembangunan karena dianggap lebih relevan. Hingga saat ini sudah mencapai enam tahun sejak program SDGs dilaksanakan masih dengan tujuan yang sama yaitu “zero goal” untuk kemiskinan dan kelaparan, Artinya hasil pembangunan diharapkan dapat mencapai kondisi tidak ada lagi penduduk dunia yang mengalami kelaparan dan kemiskinan. Dalam capaian SDGs kemiskinan dan kelaparan ini diakomodir empat komponen diantaranya: proporsi populasi yang hidup di bawah garis kemiskinan, *Poverty gap* rasio, Penduduk yang mengkonsumsi < 1400 ccal/kapita, *Prevalence* anak yang mengalami *stunting*. Keempat komponen tersebut diistilahkan dengan Indeks Kemiskinan dan Kelaparan (IKK). Penurunan IKK ditargetkan akan tercapai pada tahun 2030. Tercapai atau tidaknya target dan tujuan IKK sangat tergantung pada strategi dan kebijakan yang diterapkan oleh masing-masing negara.

Untuk Indonesia target ini menjadi suatu tantangan yang sulit apabila memperhatikan strategi dan indikator pendukung pencapaian pembangunan SDGs. Indonesia sudah melakukan sebuah terobosan dengan merencanakan, melaksanakan pembangunan sesuai kepentingan wilayah. Kondisi wilayah seperti faktor demografi, melalui tingkat kepadatan penduduk, tingkat kelahiran, dan tingkat penghasilan/ pendapatan yang menjadi faktor penentu pencapaian indeks kemiskinan kelaparan. Angka BPS menunjukkan sejak periode SDGs indeks kemiskinan dan kelaparan sudah mengalami penurunan. Data tahun 2015

meninformasikan IKK Indonesia 7,11 persen. menurun pada 2020 tahun dibandingkan tahun 2016 menjadi 5,78 persen., hingga tahun 2021 adalah 5,74 persen. Untuk wilayah Barat Indonesia seperti Aceh 0,27persen, Sumatera Utara 0,21 persen, DKI Jakarta 0,14 persen dan Bali 0,08 persen, sementara wilayah timur Indonesia masih lebih tinggi yaitu NTB 0,32 persen, NTT 0,39 persen, Sulawesi Barat 0,29 persen, Maluku Utara 0,41persen, Papua sebanyak 0,55 persen dan Papua Barat 0,48 persen (Statistik Kesejahteraan Indonesia, 2015; Statistik Kesejahteraan Indonesia, 2020).

Perbedaan angka ini mengindikasikan bahwa terdapat faktor yang berbeda dalam pencapaian target indeks kemiskinan kelaparan diantara kedua wilayah Indonesia. Dengan memperhatikan data-data pencapaian tersebut, maka perlu dilaksanakan evaluasi bagaimana dan sejauh mana pencapaian IKK diwilayah Barat dan Timur Indonesia, sejak tahun 2016 dan tahun 2021.Evaluasi dilakukan dengan mempertimbangkan data awal SDGs dan data tahun terakhir pencapaian SDGs-2. Apabila hasil evaluasi sudah diketahui, maka dapat ditelusuri kiranya perbandingan pencapaian antara kedua wilayah disertai perbedaan faktor yang menyebabkan adanya korelasi PHI dan faktor yang menyertainya.

Bagaimana mengukur “kemiskinan dan kelaparan” menjadi tantangan pertama untuk diketahui kinerja suatu wilayah secara efektif. Dalam hal ini, empat indikator resmi diidentifikasi, antara lain (1) Proporsi populasi yang hidup di bawah garis kemiskinan; (2) Poverty gab rasio; (3) Penduduk yang mengkonsumsi < 1400 ccal/kapita; dan (4) Prevalence anak yang mengalami *stunting*. Penelitian ini merupakan penelitian yang urgen dikarenakan program SDGs sudah memasuki tahun ke-6 jadi perlu adanya evaluasi dan sangat penting untuk mengetahui faktor yang berkorelasi dari pencapaian target PHI guna mendalami kebijakan strategis yang sudah dijalankan pemerintah dan regulasi kebijakan yang diperlukan berikutnya. Sementara dalam penelitian sebelumnya belum bisa menjawab persoalan ini secara konprehensif, terutama menyangkut perbandingan struktur demografi penduduk Indonesiayang berkorelasi dengan pencapaian IKK di wilayah Timur dan Barat Indonesia, kondisi-kondisi yang disebabkan oleh kepadatan penduduk, tingkat kelahiran, kemampuan daya beli,dimana kondisi diwilayah Timur sangat berbeda dengan wilayah Barat. Tingkat kepadatanPenduduk diwilayah timur relative rendah jika dibandingkan di wilayah Barat, wilayah Timur memiliki tingkat kepadatan rata-rata 0,15 %, sementara Wilayah Barat memiliki tingkat kepadatan 0,72 persen (Statistik Kesejahteraan, 2019).

Demikian juga kondisi tingkat fertilitas, dimana wilayah timur Indonesia rata-rata fertilitas masih relatif tinggi dibandingkan wilayah Barat. Tingkat fertilitas rata-rata wilayah di wilayah Timur adalah 2,4 persen dibandingkan wilayah barat yang hanya 1,9 persen keseluruhan variabel tersebut akan dilihat dalam penelitian ini.

TINJAUAN LITERATUR

Korelasi Pendapatan dan Indeks Kemiskinan Kelaparan (IKK)

Kelaparan dan kemiskinan sangat terkait dengan meningkatnya populasi, sebagaimana pernah dikemukakan oleh Malthus (1778) dalam *theorinya an essay on the principle of population*. Teori Maltus yang menjelaskan bahwa pertumbuhan penduduk akan lebih cepat dari pada pangan itu sendiri. Teori ini juga menjelaskan bahwa suatu saat nanti harga pangan akan semakin mahal karena jumlah penduduk yang semakin banyak tidak diimbangi dengan ketersediaan pangan yang ada di bumi. Berarti tidak mengherankan jika kelaparan akan terjadi. Teori yang pernah dikemukakan mengenai hal ini bahwa kelaparan dan kemiskinan terkait dengan pendapatan per kapita, dikemukakan oleh Faharuddin (2010), Indeks kemiskinan dan kelaparan memiliki hubungan linier yang signifikan dengan pendapatan per kapita., sama dengan yang dikemukakan oleh Gentilini (2008), bahwa pendapatan mempengaruhi kemiskinan 11,3 persen dan mempengaruhi kelaparan 9,7 persen. Alkire (2016) menunjukkan hasil uji ekonometrik, kenaikan pendapatan dapat secara signifikan mengurangi kemiskinan secara multidimensi, walaupun dampaknya kecil. Pendapatan akan mencerminkan kualitas hidup dan tingkat kemiskinan.

Ketika pendapatan rumah tangga menurun, prevalensi ketidakamanan pangan meningkat, semakin rendah pendapatan semakin besar kemungkinan individu untuk makan makanan dengan porsi lebih kecil dari kebutuhan yang seharusnya mereka makan. 83 persen individu harus makan dengan porsi kecil bagi yang memiliki pendapatan di bawah USD 20.000 (Annestrand, Lenz, Bird, James, 2017). Alarcon at all (2016) melihat faktor sosioekonomi terhadap malnutrisi, di Nairobi, dengan cara melakukan survei kecukupan nutrisi dengan tipe rumah tangga yang memiliki tingkat pendapatan berbeda. Hasilnya menunjukkan karakteristik sosioekonomi (pendidikan dan pendapatan mempengaruhi untuk memiliki anak-anak yang mengalami malnutrisi dan tumbuh kerdil). Sementara pendapatan yang lebih tinggi dikaitkan dengan praktik kesehatan dan gizi yang positif sehingga keluarga

tersebut bisa mencapai nutrisi optimal. Hampir sama dengan penelitian Nwokolo (2017) terhadap 12.000 populasi dan 114 sampel di Kota Cape Afrika Selatan. Hasilnya adalah tingkat pendidikan dan sumber pendapatan berhubungan positif terhadap ketahanan pangan rumah tangga, ini menunjukkan bahwa, faktor pendapatan menyebabkan kelaparan dan ketidakamanan pangan karena imbas dari tingkat pendidikan rendah, sehingga menyebabkan mereka tidak mendapatkan pekerjaan yang layak.

Korelasi Kepadatan Penduduk dan Indeks Kemiskinan Kelaparan

Kepadatan penduduk adalah perbandingan jumlah penduduk dengan luas lahan. Secara umum, tingkat kepadatan penduduk (*population density*) adalah perbandingan banyaknya jumlah penduduk dengan luas daerah berdasarkan satuan luas tertentu. Ketidak seimbangannya antara penambahan penduduk dengan produksi pangan dan sumber daya lainnya dapat berakibat buruk bagi negara tersebut. Negara tersebut juga akan terhambat kemajuannya (Cerdika Ary, 2018). Berkurangnya lahan dapat diartikan sebagai terbatasnya lahan yang dapat dijadikan tanah untuk budidaya baik pertanian atau peternakan, yang berdampak pada naiknya harga pangan, sehingga kecukupan pangan diragukan (Pech.S, 2017).

Kepadatan penduduk menjadi momok bagi kerawanan pangan, logisnya adalah ditempat yang penduduknya padat ini menjadi masalah serius, dikarenakan distribusi pangan menjadi tidak merata dan perebutan makanan menjadi pemandangan biasa. Pada daerah penduduk yang padat juga memunculkan masalah kemiskinan, karena perebutan lahan pekerjaan, menjadikan upah berdasarkan subsisten. Artinya banyak penduduk mau dibayar dengan upah rendah. Seperti hasil temuan Waliun (2014), dengan survey pada dua daerah terpadat di ibukota Khanzastan, terdapat fakta daerah terpadat di dua daerah tersebut sangat banyak memunculkan masalah social dan kemiskinan menjadi terstruktur.

Criastiani, Tedjo dan Soetomo (2015) menyimpulkan tentang kemiskinan karena kepadatan penduduk secara kuantitatif, bahwa pada daerah yang jumlah penduduknya 11.754.009 juta jiwa tingkat kemiskinan 13,7 persen, sementara pada daerah dengan jumlah penduduk 9.234.120 jiwa maka tingkat kemiskinan 9.5 persen. Untuk mengatasi kepadatan guna peningkatan kesejahteraan, maka dilakukan upaya transmigrasi. R, Rank dan A. Hirsch (2013), mengilustrasikan hipotesis hubungan kepadatan populasi dengan partisipasi kupon

makanan. Menunjukkan bahwa hubungan positif antara kepadatan populasi dan probabilitas partisipasi dalam program kupon makanan, artinya kepadatan menentukan jumlah pangan yang harus disubsidi yang mengindikasikan lebih banyak penduduk yang tidak mampu memenuhi makanannya secara mandiri. *Food availability, in the future, agriculture will be challenged to meet the demand of a population that is projected to grow and urbanize. This implies that more food will be demanded by a population of net food buyers, and food demand will have to be met by rural and peri urban areas and by food imports.* Ketersediaan pangan, di masa depan, menjadi tantangan di masa depan untuk memenuhi permintaan populasi yang diproyeksikan terus tumbuh karena peningkatan urbanisasi. Ini menyiratkan bahwa lebih banyak makanan yang diminta oleh populasi terhadap makanan netto, akibat kepadatan penduduk dan permintaan makanan maka harus dipenuhi oleh pedesaan dan pinggiran kota dengan cara oleh impor makanan (Mutisya, 2016).

Bagaimana tingkat kelahiran juga akan mempengaruhi kemiskinan dan kelaparan, adalah suatu permasalahan yang akan diteliti dalam kasus ini. Teori yang dikemukakan oleh Aditono (2020), akibat dari tingkat kelahiran tinggi akan menyebabkan kekurangan pangan, sebagai akibat dari pertumbuhan penduduk yang tidak seimbang dengan jumlah lahan untuk memproduksi pangan.

Perspektif yang sering dilupakan adalah bahwa kemiskinan terjadi karena banyaknya angka ketergantungan, sehingga banyak orang di usia produktif harus banyak menerima beban anggota keluarga yang harus ditanggungnya karena memang tidak bekerja, usia ketergantungan di bawah 15 tahun yang banyak karena disebabkan wanita yang melahirkan dengan angka kesuburan. Jadi ada kemungkinan TFR dalam suatu wilayah akan mempengaruhi persentase kemiskinan penduduknya. Menurut Ross (2017), penurunan proporsi penduduk usia muda akan mengurangi besarnya investasi untuk pemenuhan kebutuhan mereka, sehingga sumber daya dapat dialihkan, dan bisa memicu peningkatan kesejahteraan keluarga untuk terhindar dari kemiskinan.

METODE PENELITIAN

Metode penyusunan indeks PHI (*Poverty and Hunger Index*) didasarkan pada metodologi penyusunan *Human Development Index* (HDI) yang dilakukan oleh UNDP (UNDP, 2008) atau sama dengan metodologi penghitungan Indeks Pembangunan Manusia

(IPM) yang dilakukan di Indonesia (BPS, 2008). PHI disusun menggunakan rumus sebagai berikut:

$$PHI - P = \sum_{i=1}^4 (x_i - \min i) / [(\max i - \min i)].1/4$$

Nilai aktual dari indikator ke-i serta *maks* dan *min* adalah nilai maksimum dan minimum dari masing-masing indikator (Gentilini dan Webb, 2008). Nilai maksimum dan minimum indikator PHI disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1
Poverty and Hunger Index PHI dimensional goal spots

SDGs Indikator	Max	Min
Proportion of population living on less than US\$/day	100	0
Kedalaman kemiskinan	100	0
Penduduk yang mengkonsumsi dibawah 14000 ccal/hari/kapita	100	0
Underweight	100	0

Sumber: Gentilini dan Webb, 2008

Dalam kerangka evaluasi pencapaian tujuan SDGs pada tahun 2020, maka nilai maksimum dan minimum kemudian disesuaikan dengan nilai awal masing-masing indikator pada tahun 2016 serta target yang akan dicapai pada tahun 2020. Sehingga rumus di atas menjadi:

$$PHI = \sum_{i=1}^4 (x_i - 2010) / (2016 - 2010)].1/4$$

di mana, PHI-P adalah *PHI progress*, ‘2020’ menunjukkan data kondisi awal yang paling dekat dengan tahun 2020 dan ‘2016’ adalah kondisi target yang akan dicapai pada tahun 2016. Berdasarkan target nilai indikator pada tahun 2016 yang telah ditetapkan pemerintah Indonesia melalui Bappenas (2010 dan 2016) serta kondisi awal indikator pada tahun 2010, ditetapkan nilai maksimum dan nilai minimum untuk keempat indikator di atas. Indikator yang tidak memiliki target angka spesifik, nilai maksimum digunakan setengah dari kondisi awal tahun 2010. Dengan demikian, nilai maksimum dan minimum indikator PHI-P disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2
Nilai Awal dan Nilai Target Indikator PHI-P dalam Kerangka Evaluasi Pencapaian SDGs di Indonesia

Indikator	Nilai awal	Nilai Target
1. Persentase penduduk yang beradadi bawah garis kemiskinan	8,50	3,06 ^{*)}
2. Indeks Kedalaman kemiskinan dalam persen	2,09	0,98 ^{*)}
3. Balita yang mengalami stunting	6,83	1,89
4. Proporsi penduduk dengan konsumsi kurang dari 1400 kkal per hari, dalam persen	11,15	4,32

Sumber: Bappenas (2016)

Untuk menafsirkan hasil dengan benar, harus diingat bahwa, di satu sisi, kerangka SDGs tidak secara eksplisit menetapkan kuantitatif target untuk indeks kemiskinan, menciptakan kesenjangan informasi tentang cara menafsirkan dan mengukur perubahan dari waktu ke waktu. Dengan demikian, sejalan dengan pendekatan ‘zero goals’ yang ditetapkan oleh PBB (Infid, 2015).



Gambar 1. Pengukuran pada Provinsi DKI Jakarta

Untuk membandingkan nilai pencapaian dan nilai target, pendekatan yang dilakukan adalah dengan menghitung nilai PHI menggunakan rumus diatas pada masing-masing wilayah timur dan Barat Indonesia., nilai capaian tahun 2016 diperoleh dari perhitungan sebelumnya melalui capaian tahun 2010. Dengan acuan harapan pemerintah yang menginginkan setiap tahun ada pengurangan terhadap indikator PHI sebesar 0,5-2 persen. oleh karena itu kami menetapkan target 1,5 persen penurunan untuk masing-masing indikator pada tahun 2020. Gambar 1 merupakan salah satu provinsi yang berada di wilayah Barat Indonesia yang dihitung PHI-nya, untuk Provinsi DKI Jakarta.

Mengukur Korelasi Pendapat Perkapita, Kepadatan Penduduk, Fertilitas, dan PHI

Hubungan antara pendapatan perkapita, kepadatan penduduk dan Tingkat Fertilitas dengan indeks kemiskinan dan kelaparan dilihat melalui nilai korelasi dengan formula ekonometrika. Uji statistik yang digunakan untuk menganalisis hubungan antar variabel secara simetris dilakukan dengan *uji Phi.Cramer's V* dan *Contingency Coefficient* (Winarno, 2015). Hipotesis nol (Ho) yang digunakan adalah tidak ada hubungan antara kedua variabel, dan hipotesis alternatif terdapat hubungan antara kedua variabel. *Uji Phi, Cramer's V dan Contingency Coefficient*, dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^r \sum_{j=1}^k \frac{(O_{ij} - E_{ij})^2}{E_{ij}}$$

Untuk menganalisis hubungan antar variabel dependen dan independen digunakan *multiple corelation analysis*, yang menunjukkan angka kuatnya hubungan antara dua variabel atau lebih secara bersama-sama. Menurut Ghozali (2013), formulasi perhitungan korelasi pada variabel berganda adalah;

$$R_{y, x1, x2, x3} = \frac{\sqrt{r^2_{yx1} + r^2_{yx2} + r^2_{yx3} - 2r_{yx1}.r_{yx2} - 2r_{yx2}.r_{yx3} - 2r_{yx1}.r_{yx3}}}{1 - r^2_{x1x2} - r^2_{x1x3} - r^2_{x2x3}}$$

Tabel 3
Variabel Penelitian

Variabel		Kategori
Terikat	Bebas	
(1)	(2)	(3)
BPHI	X1 - KPP _j X2- Tk Fertilitas (FTL _j) X3- Pendapatan (ICM _k)	Persentase Persentase Nominal
TPHI	X1 - KPP _j X2- Tk Fertilitas (FTL _j) X3- Pendapatan (ICM _k)	Persentase Persentase Nominal

Dimana BPHI adalah Poverty hunger indeks pada katagori ke-i variabel KKP (kepadatan penduduk), katagori ke-j variabel FTL (Fertilitas/tingkat kelahiran) dan Tingkat Pendapatan

(ICM), PHI yaitu Rata-rata indeks, sedangkan TPhi yaitu perbandingan PHI Untuk wilayah Barat dan Timur Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil yang disajikan dalam bagian ini didasarkan pada data yang diberikan oleh Badan Pusat statistik dan pemetaan SDGs (2016), serta potret pembangunan berkelanjutan Indonesia (2016), khususnya data dari indikator kesejahteraan rakyat tahun 2020. Meskipun data mencakup sebagian besar wilayah barat dan timur indonesia, kekurangannya informasi untuk satu atau lebih dari lima empat dimensi akan membatasi kemungkinan analisis, terutama ketika membangun trend. Rekomendasi utama artikel ini adalah yang memperkuat uji statistik dengan kapasitas wilayah masing-masing untuk menghasilkan data yang dapat diandalkan tentang pencapaian indikator SDGs-2 adalah penting, tanpanya kita tidak bisa memiliki pemahaman yang jelas tentang kemajuan masing-masing wilayah di Indonesia seperti DKI Jakarta, Aceh, Papua, Bali dan Sumatera. Komparasi pencapaian PHI antara wilayah Timur dan Barat Indonesia dalam dua periode data yaitu tahun 2016 sejak permulaan program SDGs dan tahun 2020 setelah lima tahun perjalanan SDGs.

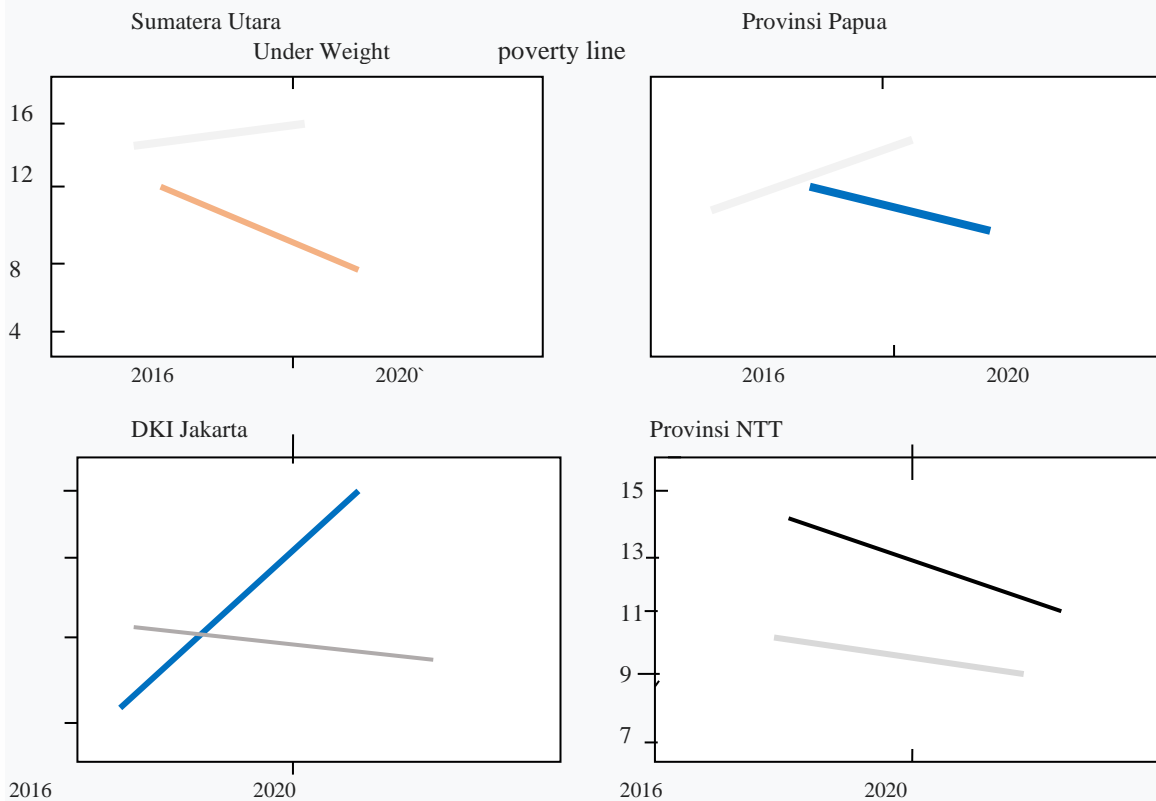
Tabel 4
Perbandingan PHI Antar Provinsi di Indonesia

2016				2020			
Wilayah Barat		Wilayah Timur		Wilayah Barat		Wilayah Timur	
Prov	PHI	Prov	PHI	Prov	PHI	Prov	PHI
Aceh	0.272	Bali	0.087	Aceh	0.122	Bali	0.320
Sumbar	0.148	NTT	0.391	Sumbar	0.182	NTT	0.321
Sumut	0.215	NTB	0.232	Sumut	0.143	NTB	0.372
Sumsel	0.233	Sulteng	0.236	Sumsel	0.119	Sulteng	0.412
DKI	0.167	Sulsel	0.218	DKI	0.101	Sulsel	0.324
DI Yogya	0.210	Sultengg	0.236	DI Yogya	0.020	Sultengg	0.432
Jabar	0.176	Sulut	0.275	Jabar	0.122	Sulut	0.234
Jatim	0.191	Gorontalo	0.271	Jatim	0.112	Gorontalo	0.327
Jateng	0.243	Maluku	0.411	Jateng	0.110	Maluku	0.450
Jambi	0.209	Sulbar	0.198	Jambi	0.191	Sulbar	0.411
Riau	0.189	Malut	0.345	Riau	0.228	Malut	0.321
Banten	0.130	Papua	0.484	Banten	0.331	Papua	0.402
Kep. Riau	0.145	Papua Barat	0.555	Kep. Riau	0.212	Papua Barat	0.377

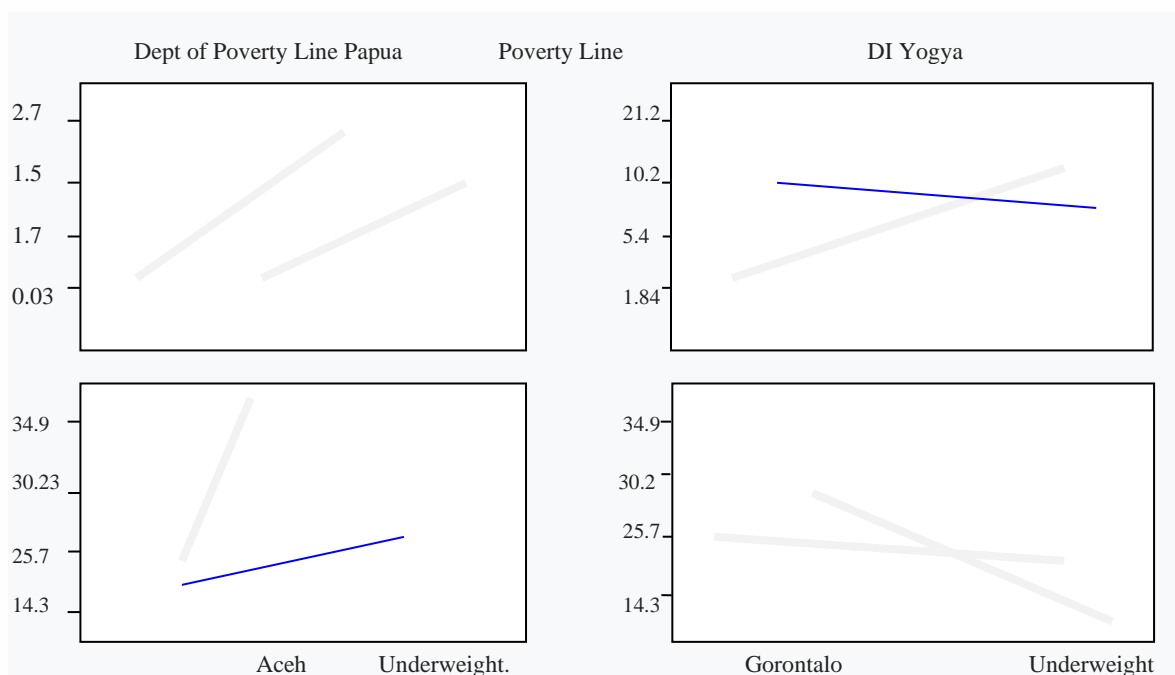
Sumber: *Authour's Calculation*, 2021

Data tersebut menunjukkan nilai indeks kemiskinan dan kelaparan (PHI), sekaligus menunjukkan perbandingan PHI di wilayah timur dan Barat Indonesia. Nilai PHI yang masih tinggi mencerminkan indeks kemiskinan dan kelaparan di wilayah tersebut masih tinggi. Berdasarkan data

tersebut dapat diuraikan bahwa pada tahun 2020 seluruh wilayah wilayah Barat mengalami perbaikan terhadap trend indeks kemiskinan dan kelaparan dibandingkan tahun 2016. Seperti DKI Jakarta memiliki nilai PHI sebesar 0,167 persen, Jawa Barat sebesar 0,176 Persen, kemudian DI Yokyas sebesar 0,210 persen, sebaliknyaadengan wilayah Timur tidak mengalami perubahan yang signifikan. Misalnya provinsi NTT menurun indeks kemiskinan dan kelaparan sebesar 0,02 persen dari 0,39 persen tahun 2016 menjadi 0,38 pada tahun 2020, begitu juga dengan NTB hanya menurun 0,05 persen, dari 0,41 persen menjadi 0,40 persen. bahkan Papua sama sekali tidak mengalami penurunan masih tetap di angka 0,41 persen, berbeda dengan papua Barat menurun angka PHI menjadi 0,39 persen pada tahun 2020. Berikut penjabaran secara grafis terhadap komparasi capaian indikator PHI di beberapa Provinsi wilayah Barat dan Timur Indonesia, seperti diperlihatkan Gambar 2.



Gambar 2. Trend Kemiskinan dan Kelaparan pada masing-masing Provinsi Wilayah Barat dan Timur Indonesia



Gambar tersebut menunjukkan Provinsi di wilayah Barat mengalami trend PHI yang lebih Baik dibandingkan wilayah Timur untuk masing- masing indicator. Misalnya saja seperti Aceh masalah underweight masih lebih bagus capaiannya di bandingkan di wilayah Timur Seperti Papua, dimana tren untuk indikator underweight masih tinggi.

Tabel 5
Pencapaian Indikator PHI Tahun 2020 di Indonesia

Wilayah Barat					Wilayah Timur				kedalaman
Prov.	The line poverty	<Consump 1400 ccal	Under weight	The dept of poverty	Prov	The line poverty	<Consumpt 1400 ccal	Under weight	
Aceh	9.50	9.61	34.19	1.55	Bali	5.57	3.94		0.65
Sumbar	2.49	7.19	27.47	0.87	NTT	31.45	8.93	43.8	1.39
Sumut	6.32	6.06	30.11	1.50	NTB	18.25	3.67	37.85	2.35
Sumsel	14.31	4.51	30.59	2.19	Sulteng	21.70	6.81	31.45	1.55
DKI	0.07	7.76	19.96	0.64	Sulsel	20.25	7.05	30.59	0.79
Yogya	12.54	2.15	21.64	2.35	Sulteng	21.70	8.28	31.44	1.33
Jabar	11.42	6.57	26.21	1.36	Sulut	12.91	8.96	30.11	0.80
Jatim	16.08	6.67	24.96	1.31	Gorontalo	24.28	5.32	34.29	0.58
Jateng	18.50	8.92	27.68	1.68	Maluku	8.93	10.05	30.33	0.94
Jambi	6.21	8.64	21.64	2.20	Sulbar	25.33	9.69	40.38	1.52
Riau	3.27	9.78	24.31	1.01	Malut	6.88	20.65	23.95	0.97
Banten	4.32	4.42	24.31	0.98	Papua	16.29	25.43	24.36	0.85
K.Riau	1.84	8.59	16.81	1.02	Pa Barat	16.29	20.65	24.58	1.20

Sumber: Laporan BPS, Statistik Kesejahteraan (2020)

Berdasarkan data yang tersedia, analisis korelasi non-parametrik diuraikan pada Tabel 5 mendukung sebagian besar temuan penelitian dari literatur tentang hubungan antara indeks kemiskinan dan kelaparan dengan nilai composi PHI. Nilai composi PHI antar wilayah timur dan Barat sangat bervariasi, walaupun secara rata-rata dapat disimpulkan

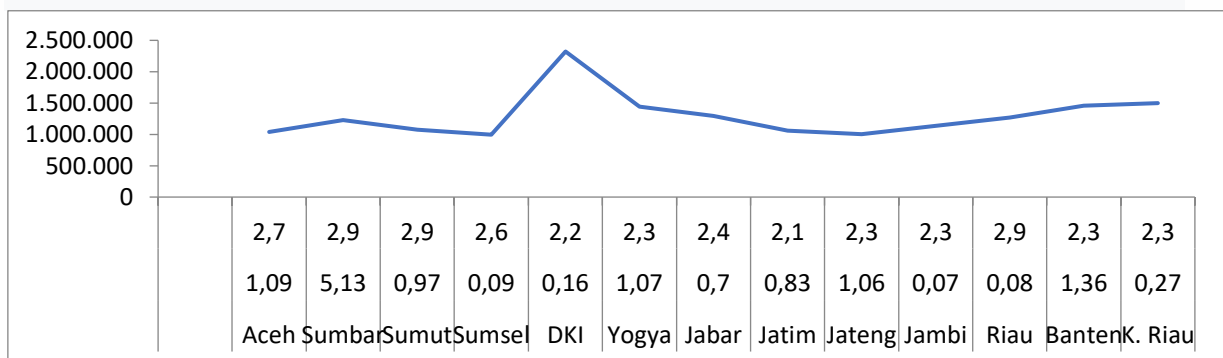
bahwa selisih nilai composit input PHI dari kedua wilayah tersebut tidak jauh berbeda. Untuk indikator konsumsi di bawah standar lebih besar persentasenya pada provinsi-provinsi di wilayah timur dibandingkan dari provinsi-provinsi wilayah barat. Begitu juga untuk indeks kedalaman kemiskinan untuk wilayah timur lebih tinggi dibanding wilayah barat rata-rata sebesar 0-1,5 persen. DKI Jakarta sebagai ibu kota Indonesia ternyata memiliki pencapaian sangat baik pada beberapa indikator seperti indeks kedalaman kemiskinan, persentase yang hidup dibawah garis kemiskinan, dan status balita stunting.

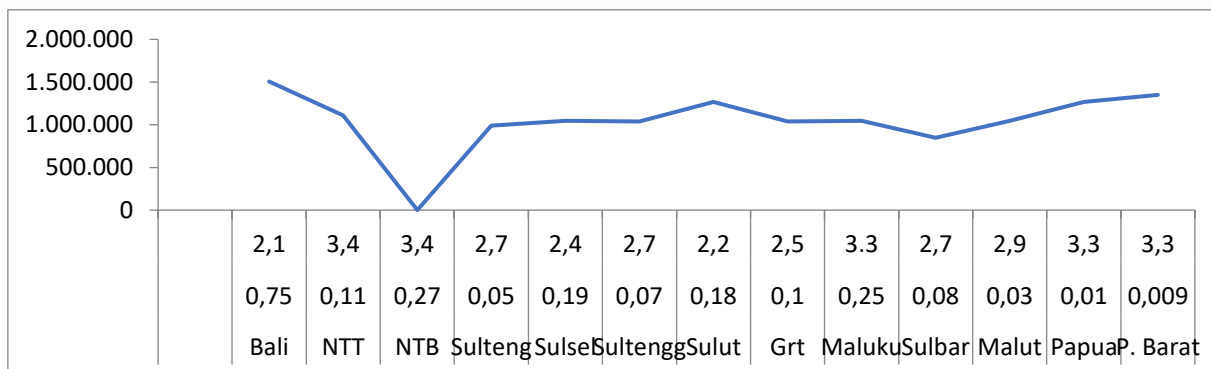
Tabel 6
Komparasi Kultur Demografi di wilayah Barat dan Timur Indonesia Tahun 2020

Wilayah Barat				Wilayah Timur			
Provinsi	KPP	FTR	ICM	Provinsi	KKP	FTR	ICM
Aceh	1.09	2.7	1.040.866	Bali	0.75	2.1	1.506.148
Sumbar	5.13	2.9	1.228.025	NTT	0.11	3.4	1.108.608
Sumut	0.97	2.9	1.077.177	NTB	0.27	3.4	800.000
Sumsel	0.09	2.6	995.047	Sulteng	0.05	2.7	989.044
DKI	0.16	2.2	2.322.246	Sulsel	0.19	2.4	1.045.560
DI Yogya	1.07	2.3	1.442.796	Sultengg	0.07	2.7	1.038.490
Jabar	0.70	2.4	1.293.866	Sulut	0.18	2.2	1.268.167
Jatim	0.83	2.1	1.059.177	Gorontalo	0.10	2.5	1.038.490
Jateng	1.06	2.3	1.000.875	Maluku	0.25	3.3	1.045.942
Jambi	0.07	2.3	1.133.704	Sulbar	0.08	2.7	847.375
Riau	0.08	2.9	1.267.693	Malut	0.03	2.9	1.045.809
Banten	1.36	2.3	1.458.404	Papua	0.01	3.3	1.267.942
Kep. Riau	0.27	2.3	1.498.094	Papua Barat	0.009	3.3	1.348.965

Sumber: Statistik Sosial (2020)

Menarik jika kita perhatikan perbandingan PHI dan pendapatan perkapita. Meskipun peringkat PHI dan indek pembangunan manusia tidak selalu sejalan, namun berkorelasi dengan pendapatan perkapita dan keduanya memiliki hubungan yang linier dan sangat signifikan.





Gambar 3. Komparasi Kultur Demografi di Wilayah Barat dan Timur Indonesia

Tabel 7
Korelasi PHI, FTR, KPP, ICM wilayah Barat Indonesia

		PHI	KKP	FTR	ICM
PHI	Percen Corelation	1	0,810**	0,065**	0,456**
	Sig. (2tallt)				
	N	13	13	13	13
FTR	Percen Corelation	0,082**	1	0,112	0,321**
	Sig. (2tallt)	0,000		0,000	0,000
	N	13	13	13	13
KPP	Percen Corelation	0,405**	0,832**	1	0,0112
	Sig. (2tallt)	0,000	0,000	0,000	
	N	13	13	13	13
ICM	Percen Corelation	0,002	0,891**	0,007	0,971**
	Sig. (2tallt)				
	N	13	13	13	13

*** Correlation is significant at the 0.01 level (2-Tailed).

Sumber: data diolah (2021)

Tabel 8
Corellation PHI, FTR, KPP, ICM wilayah Timur Indonesia

		PHI	KKP	FTR	ICM
PHI	Percen Corelation	1	0,716**	0,021	0,065**
	Sig. (2tallt)				
	N	13	13	13	13
FTR	Percen Corelation	0,082**	0,093	0,112	0,321**
	Sig. (2tallt)	.	0,000	0,000	0,000
	N	13	13	13	13
KPP	Percen Corelation	0,005**	0,832**	1	0,0112
	Sig. (2tallt)	.	0,000	0,000	
	N	13	13	13	13
ICM	Percen Corelation	0,082	0,891**	0,007	0,6111**
	Sig. (2tallt)	0,000	0,000		
	N	13	13	13	13

*** Correlation is significant at the 0.01 level (2-Tailed).

Sumber: data diolah (2021)

Hasil uji korelasi menunjukkan bahwa sangat erat kaitan antar variabel Indeks kemiskinan dan kelaparan dengan Kultur Demografi di wilayah Barat dan Timur Indonesia, yang mencakup kepadatan penduduk, tingkat kelahiran, dan pendapatan perkapita. Hasil uji data menunjukkan, untuk tingkat kepadatan penduduk (KKP) dengan nilai signifikansi 0,716, begitu juga terhadap variabel tingkat kelahiran signifikan pada angka 0,082 dan untuk variabel tingkat pendapatan ditunjukkan oleh angka 0,02, yang mengindikasikan adanya hubungan kepadatan penduduk dengan pencapaian nilai indeks kemiskinan dan kelaparan pada tiga belas provinsi di wilayah Barat Indonesia yang dijadikan sampel penelitian. Data uji juga memperlihatkan kondisi di Wilayah Timur Indonesia, ada sedikit perbedaan hasil penelitian diantara keduanya. Bahwa di wilayah timur menunjukkan tidak semua variabel berkorelasi positif terhadap indeks kemiskinan dan kelaparan. Seperti variabel tingkat tingkat kelahiran tidaklah berkorelasi dengan PHI, ini ditunjukkan oleh hasil perhitungan yaitu 0,212, demikian juga dengan variabel kepadatan penduduk (KKP) juga tidak berhubungan positif ditunjuk oleh angka 0,0112. Hasil uji ini sangat beralasan untuk mengemukakan perbedaan hasil penelitian keduanya, sesuai teori Gentelini dan Webb (2018), menghasilkan matriks prioritas wilayah pembangunan akan menentukan pencapaian indeks PHI, prioritas dimaksud adalah dalam membangun infrastruktur dan membangun manusia. Prioritas yang lebih tinggi dalam pembangunan Indonesia adalah berada di wilayah Barat, sedangkan prioritas rendah berada di wilayah Papua Barat, Maluku, dan NTT.

Alasan lainnya yang bisa dikemukakan adalah sektor usaha yang berbeda diantara kedua daerah, bahwa masyarakat di Indonesia belahan timur sektor usaha lebih orientasi pada agrikultur, kebanyakan penduduk memperoleh upah dari bekerja di sektor agribisnis, seperti dikemukakan Colombe dan Mckayy, 2013, bahwa pada masyarakat yang bergerak di bidang usaha agrikultur dan pertanian cenderung mengalami kemiskinan, karena terkadang harga-harga hasil ekonomi agrikultur tidaklah stabil, dan tidak mewakili indeks harga yang sesungguhnya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Secara deskriptif dapat digambarkan perbedaan beberapa variabel antara wilayah Barat dan wilayah timur Indonesia. Variabel indeks kemiskinan dan kelaparan (PHI) menunjukkan angka yang berbeda di kedua wilayah PHI yang lebih tinggi terdapat di Wilayah Timur

Indonesia, sebaliknya PHI di wilayah Barat relatif lebih rendah. Variabel kultur demografi secara deskriptif dari wilayah Barat Indonesia relatif lebih baik dibandingkan dari wilayah timur Indonesia, seperti tingkat kelahiran. Rata-rata tingkat kelahiran di wilayah timur lebih tinggi dibandingkan di wilayah barat, begitu juga dengan tingkat pendapatan penduduk, masih lebih padat di wilayah timur, sedangkan tingkat pendapatan hampir menyamai diantara keduanya.

Berdasarkan hasil penelitian maka diperlukan koreksi yang detil dan sempurna untuk memperkecil *gap* antara kedua wilayah Barat dan Timur Indonesia terhadap indikator Kemiskinan dan Kelaparan (IKK), dengan cara menaikkan tingkat pendapatan penduduk dan merubah kultur demografi dalam berbagai bentuk yang menghambat tercapainya SDGs-2. Kiranya program SDGs-2 benar-benar harus dimulai dari tingkat desa, tanpa mengabaikan kondisi kemiskinan perkotaan, supaya indikator IKK terlihat detil dan jelas, agar bisa disempurnakan pencapaian di tahun 2030.

DAFTAR PUSTAKA

- Adietomo, M. (2018). Pengaruh investasi PMA dan PMD terhadap pertumbuhan ekonomi daerah provinsi tingkat I Jawa Tengah, Yogyakarta, *Magister Ekonomi Pemmabangunan UGM. Universitas Gajah Mada.*
- Alarcon Salas, B Hasler, I.R. Dhoho.K. Colverson, Murage, S. Alonso E. Ferguson, E.M Fevre Rushton, D. Grace, (2016). Nutritional characterization of low income household of Nairobi; *socioeconomic, livestock and gender consideration and predictors of malnutrition from cross-sectional. 5(9). Volume 11.*
- Annestrand, Lenz, Bird, James, (2017). The Impact of income Levels on food Insecurity in Rural Community, *Undergraduate Journal of Service Learning and Community-Based Research, Volume 5(1). Tarleton State University.*
- Badan Pusat statistik, (2016). *Data Mikro Kemiskinan Indonesia.* Katalog 2008735: Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat statistik, (2016). *Trend Tenaga Kerja Indonesia dan Sosial,* Periode Agustus 2016. Katalog 24111007. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Cerdika Ary, (2018). *Metode Penelitian Kualitatif di bidang Pendidikan sosiologi,* edisi revisi, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Coulobe, H, McKay, A, (2013). *Selective Poverty Reduction in a SlowGrowth Environment; Ghana in the 1990.* Paper Prepared for the Word Bank

- Criastiani, Tedjo dan Soetomo (2015). Analisis Dampak Kepadatan Penduduk terhadap kualitas hidup Masyarakat Jawa Tengah. *Jurnal kependudukan dan Sumber daya Manusia. Serat Acita. Universitas 17 Agustus 1945*.
- Faharuddin (2012). Mengukur Pencapaian penanggulangan Kemiskinan dan Kelaparan di Indonesia 2010, *Jurnal Agro Ekonomi* 30(2), 145-157.
- Gentelini U, and Webb P, (2018). "How are Doing Poverty and Hunger reduction? A New meisure of country performance. *Journal Food Policy*, 33(6), 521-532.
- Imam Ghozali, (2013). *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program IBM SPSS 21*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Infid (2015), *Panduan Monitoring dan Evaluasi bagi pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan TPB/SDGs di Daerah. yang Rensponsif Gender, Transformatif dan Inklusif*.
- Malthus, Tri, (1978). *An Essay on the Principle of population*. J, Johson. London. Library of Economics.
- Matisya M, Kandala. N.B, Ngaware M.W and Kabiru C.W, (2016). *Household food in security and nutritional status of urban poor children age 6 to 23 mount in Kenya. BMC Public Health*, 1 (15), 1-10.
- Nwokolo, E.E. (2017). The Influence of Educational Level on Souch of Income and Household Food Security in Alice, Eastern Cape, South Africa, *Journal of Human Ecology*, 52 (3), 208-217.
- R, Rank dan A. Hirchil (2013). Pech, Sunada, 2017, Population Growth and Natural Resourch, Pressures in the Mekong River Basin. *A journal of the Human Environment (ANBIO)*, 411-419.
- Rosalina, Lina, (2017). Faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja di Indonesia, *Bogor, Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institute Pertanian Bogor*.
- W. Winarno. (2015). *Analisis Econometrics and Statistik menggunakan perangkat Eviews Edition ke empat*. UPP STIM YKPN.